

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tongkonan

1. Pengertian Tongkonan

Kata tongkonan berasal dari kata *tongkon* yang berarti 'duduk', mendapat akhiran '*an*' maka menjadi tongkonan yang artinya tempat duduk dan *ongan* berarti bernaung, duduk dan bernaung merupakan perpaduan pengertian kata tongkonan. Menurut Latuihamallo, Tongkonan adalah lambang persekutuan kekeluargaan yang mengayomi komunitas di bawah kepemimpinan tongkonan.⁷

Tongkonan pada umumnya membangun jati diri keluarga besar yang duduk dan bernaung di dalamnya, sehingga tongkonan dapat menjadi identitas untuk mempengaruhi orang lain. Tongkonan punya bentuk material dan ideologis di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja, sehingga tongkonan adalah pusat yang memengaruhi seluruh wacana praktik kehidupan sehari-hari.⁸ Dengan demikian bahwa tongkonan dapat menjadi identitas mempengaruhi orang lain.

⁷Prof. Dr. P. D. Latuihamallo. "*Berakar Di Dalam Dia & Di Bangun Di Atas Dia*", PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2002, Hlm.169.

⁸Admadi Balloara Dase, "*Hegemoni Wacana Tongkonan di Toraja*", Jurnal Retorik, Fakultas Budaya & Kepemimpinan Kristen IAKN Toraja, Indonesia, 2020, Vol.8 No.1. Hlm.37.

Tongkonan hendaknya memiliki identitas yang baik dimana harus memiliki nilai-nilai perilaku *pessiparan Toraya* yang mencakup *sipakaboro'* (saling mengasihi dan menyayangi), *siangkaran* (memberi bantuan kepada yang tak berdaya dan membantu yang lemah), *mabalele* (Sikap Sopan dan Ramah).⁹

Tongkonan menjadi simbol peningkatan kekayaan orang Toraja, Selain hal tersebut peningkatan kekayaan adalah semangat *mantunu*, ungkapan tersebut dibuktikan ketika kegiatan upacara *rambu solo'* dan *rambu tuka'* sedang di jalankan.¹⁰ Tongkonan yang terlihat megah juga memiliki ciri khasnya tersendiri. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan rumah tongkonan? Rumah adat tongkonan bukan hanya sekedar rumah adat khas masyarakat Toraja yang digunakan sebagai rumah tinggal tetapi juga rumah kekuasaan adat hingga sebagai tempat perkembangan kehidupan sosial budaya bagi masyarakat Toraja. Setiap rumah adat tongkonan mempunyai sebuah catatan filosofi yang selalu bertolak kepada sebuah falsafah kehidupan yang diambil dari ajaran *Aluk Todolo*. Filosofi tersebut berisikan bahwa bangunan rumah adat harus memiliki makna yang terikat dalam semua proses masyarakat Toraja.¹¹ Rumah tongkonan merupakan sebuah simbol keluarga dan martabat dari Masyarakat Toraja. Jadi

⁹Samuel Karre & Yohanis Arruan Banga, "*Falsafah Hidup Orang Toraja*", Penerbit Ananda Rifan, Makassar, 2024, Hlm.58.

¹⁰Aditjondro George Junus, "*PRAGMATISME Menjadi TO SUGI' dan TO KAPUA DI TORAJA*", CV Gunung Sopai Press, Yogyakarta, Juli 2010,Hlm 38.

¹¹Ben Bernardus, Dahlan Mubarak, "*FUNGSI SOSIAL RUMAH ADAT TONGKONAN DI DESA SILLANAN TANA TORAJA*", Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar, ALLIRI: JOURNAL OF ANTHROPOLOGY, Volume 5 (1) Juni 2023.

apabila rumah tersebut dijual maka secara otomatis dapat diartikan sama dengan menjual martabat dari pemilik rumah tersebut.

Adapun tongkonan di bedakan atas tiga jenis yaitu tongkonan *layuk*, tongkonan *pekaamberan*, tongkonan *batu a'iri*. Pertama : Tongkonan *layuk* yang mempunyai kedudukan tinggi dan utama sebagai ibu dari tongkonan lainnya sehingga tongkonan *layuk* menggambarkan peranan sebagai simbol keluarga besar, tongkonan *layuk* memiliki tanggungjawab yang sering kali dihubungkan dengan kekuatan, kelimpahan, dan perlindungan yang menjadi tempat dan pengendalian pemerintahan dan sumber aturan (*pesio aluk*) Toraja.¹² Kedua : tongkonan *pekaamberan* hampir sama dengan tongkonan *layuk* yang membedakan wilayah, pengaruh, kekuasaan, dan pembinaan dalam tongkonan, umumnya tongkonan ini didirikan oleh penguasan-penguasa adat yang biasanya disebut tongkonan *anak patalo* pada masing-masing daerah.¹³ Ketiga : tongkonan *batu a'iri* tidak mempunyai hak dan kekuasaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kehadirannya sebagai wadah pertalian antar rumpun keluarga dalam membina persatuan antarkeluarga, tongkonan *batu a'riri* dimiliki oleh setiap orang Toraja sebagai satu keluarga.¹⁴

¹²Mia Siti Aminah, "Mengenal Rumah Adat Nusantara", PT. Bhuna Ilmu Populer (Cakrawala), Jakarta, 2011. Hlm.102.

¹³Ibid

¹⁴Nursalam, "Makna Sosial Tongkonan dalam Kehidupan Masyarakat Tana Toraja", Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol. V Mei No. 1 2017.

2. Kepemimpinan Tongkonan

Tongkonan tidak hanya di jadikan sebagai tempat tinggal tetapi memiliki nilai-nilai tersendiri baik dari kegunaannya, keindahannya, kekokohnya, Sejarahnya dan tongkonan menjadi tempat sosok pemimpin di Toraja di lahirkan sehingga tongkonan dapat mempunyai konsep kepemimpinan.

Menurut Theodorus Kobong, Kepemimpinan Tongkonan bersumber dari pemimpin daerah (*Tondok*) dan bersatu didalam perjanjian "*Basse Lepongan Bulan*" (janji seperti keutuhan lingkaran bulan, maka seperti itulah kebulatan hati orang Toraja) perjanjian ini sebagai motivasi orang Toraja dalam menghadapi dunia luar.¹⁵ Konsep Kepemimpinan tongkonan dapat membantu menjaga dan memperkuat identitas budaya dan masyarakat Toraja, dengan menerapkan nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik yang telah ada sejak lama, pemimpin tongkonan dapat mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat.

Menurut Purnama Pasande, Kriteria kepemimpinan tongkonan mencakup tiga identitas pokok yakni: 1) *kina sola manarang*, artinya bijaksana dan berkhikmat, 2) *Sugi'*, artinya kaya, mapan, harus sanggup dalam keadaan

¹⁵Theodorus Kobong dalam Binsar Jonathan Pakpahan, Darius, Daniel Fajar Panuntun, dkk, "*Bunga Rampai Teologi Kontekstual dan Kearifan Lokal Toraja* ", PT. Gunung Mulia, Jakarta, STAKN Toraja, 2020, Hlm.153.

darurat menolong bawahannya, 3) *Barani*, artinya berani mengambil resiko dalam keadaan apapun.¹⁶ Kepemimpinan tongkonanan juga diadopsi dari konsep kepemimpinan tradisional dimana sering menekankan pentingnya kearifan lokal dan pengetahuan yang terakumulasi dari generasi ke generasi.

Kepemimpinan tongkonan Toraja hendaknya menyadari bahwa adat istiadat yang dimilikinya merupakan perwujudan diri dari masyarakat, sekaligus siap untuk menghadapi perubahan yang akan dan sedang terjadi. Menurut Koentjaraningrat, perubahan yang dialami oleh suatu masyarakat dipengaruhi oleh sistem nilai budaya, karena nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, sistem nilai budaya terdiri dari prinsip-prinsip, keyakinan, norma, dan standar yang dianut dan dijunjung tinggi oleh suatu kelompok atau masyarakat termasuk nilai-nilai moral, etika, agama, sosial, politik, dan ekonomi.¹⁷ Dengan demikian karena adanya perubahan yang ada di masyarakat maka pentingnya memandang sosok pemimpin tradisional untuk membawa masyarakat tersebut kepada perubahan. Pemimpin tradisional Toraja sangat kuat erat kaitannya dengan tongkonan karena dari tongkonanlah yang akan melahirkan generasi penerus.

¹⁶ Purnama Pasande, "KRISTOLOGI PANGALA TONDOK", Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, 2019, Vol.9 No.2, Hlm.6.

¹⁷Koentjaraningrat oleh Purwanto, A. huraerah. "Dinamika Kelompok: Konsep dan Aplikasi", Jurnal Prodi Antropologi Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 21 Juli 2021, NO 7, Vol.II.

3. Peran/Fungsi Tongkonan

Peran dan fungsi dari tongkonan menjadi pusat kegiatan adat dan budaya suku Toraja baik suka maupun duka, tongkonan juga sering digunakan sebagai tempat untuk pertemuan komunitas, musyawarah, dan diskusi penting. Peranan dan Fungsi dari tongkonan adalah simbol identitas budaya suku Toraja, keberadaannya tidak hanya mencerminkan sejarah dan tradisi suku Toraja, tetapi juga merupakan bagian penting dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan.

Menurut Theodorus Kobong, peranan tongkonan adalah subjek dalam mewujudkan harmoni dan persekutuan. Wewujudkan harmoni dan persekutuan adalah bahwa tongkonan tidak hanya merupakan sekadar rumah atau struktur fisik, tetapi juga simbol identitas yang kuat dari persatuan, kebersamaan, dan identitas budaya masyarakat Toraja, lebih jauh lagi Theodorus Kobong mengatakan bahwa peranan dan fungsi tongkonan sebagai pusat kekeluargaan,¹⁸ dengan demikian peranan dan fungsi tongkonan adalah menjadi pusat keluarga dalam membangun kehidupan sosial, tempat di mana anggota masyarakat berkumpul untuk merayakan tradisi, merajut ikatan keluarga, dan menyelesaikan konflik.

¹⁸Theodorus Kobong, *"Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, dan Transformasi"*, PT. Gunung Mulia, Jakarta, 2008. Hlm.92-117.

Ada 4 falsafa peranan dan fungsi tongkonan yakni; *dire'tok kayunna*, *dikalette' utanna*, *ditimba bubunna na dikumba' padangna*.¹⁹ Dimana maknanya *dire'tok kayunna* (tongkonan untuk mengawasi Pembangunan dan memberikan kayu dalam Pembangunan), *dikalette' utanna* (tongkonan memberikan sayurnya untuk di petik), *ditimba bubunna* (menimbah air di sumur mengandung makna tongkonan sebagai pengayom seluruh masyarakat atau saling memiliki antara si kaya dan simiskin), *na dikumba' padangna* (tanah-nyalah yang dilolah).²⁰

4. Tujuan Tongkonan

Dalam konsep tongkonan sering kali dianggap sebagai tempat di mana seseorang merasa aman dan nyaman sebab tongkonan adalah rumah di mana keluarga besar dipersatukan, beberapa tujuan dari tongkonan tersebut adalah:

- a. Tongkonan utamanya bertujuan sebagai rumah di mana keluarga dapat berbagi waktu dan ruang dengan orang-orang yang dicintai.²¹
- b. Tongkonan adalah tempat di mana keluarga dapat membentuk ikatan sosial, membangun memori bersama, mempertahankan generasi penerus

¹⁹Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), "Wilayah Adat Lili'na Dendek", 27 Maret 2024, (<https://brwa.or.id/wa/view/aHprSG9Nakc1Zzg>).

²⁰ Theodorus Kobong, Hlm.322.

²¹MarcelinaS., Pratiknjo, M. H., & Mamosey, "Rumah Adat "TONGKONAN" Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan. *HOLISTIK*", Journal Of Social and Culture, 4 Maret 2019, NO.2,VOL.2.

keluarga, melahirkan pemimpin dalam tongkonan dan memperkuat hubungan antarmanusia.²²

- c. Tongkonan bertujuan untuk menjaga pelaksanaan “Aluk” dan “Sangka” yang artinya Adat dan Budaya.²³
- d. Tujuan dari tongkonan berperan sebagai tempat untuk duduk bersama dalam mengadakan musyawarah mufakat. Kedua, tempat untuk duduk bersama membagi suka dan duka atau pusat pelaksanaan sebuah upacara adat baik suka maupun duka.²⁴
- e. Menurut St. Hadidjah Sultan, menyatakan sebuah tongkonan tidak hanya sebagai tempat hunian semata tapi juga mengandung fungsi dan makna yang bersumber dari filosofi orang Toraja, fungsi tongkonan bagi orang Toraja sebagai tempat rumpun keluarga dalam melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, sistem kekerabatan, sistem kemasyarakatan dan lainnya.²⁵

²²Ibid.

²³Ibid.

²⁴Theodorus Kobong, *“Manusia Toraja: dari mana – bagaimana – kemana”*, (Toraja: Institut Theologia Gereja Toraja, 1983). Update tahun 2014.

²⁵St. Hadidjah Sultan oleh Budiman. *“Semiotika visual konsep, isu, dan problem ikonitas budaya Toraja”*. Yogyakarta: Jurnal Jalsutra, 9 April 2020, Vol.4, No.2.

B. Konsep Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*Demokratia*" yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan/ pemerintahan.²⁶ Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Menurut Mohammad Hatta, demokrasi adalah sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat dimana persatuan dan kesatuan menjadi kerangka dalam demokrasi harus mempromosikan solidaritas dan kerjasama di antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama.²⁷

Prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu kepercayaan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Demokrasi mempromosikan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan publik., ini termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses

²⁶Ibid.

²⁷Mohammad Hatta dalam Suarlin, Fatmawati Fatmawati, "*Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*", CV. Pena Persada, Purwokerto Jawa Tengah, 2019, Hlm. 58.

pengambilan keputusan politik.²⁸ Demokrasi adalah proses atau cara di mana kekuasaan didistribusikan dan digunakan dalam masyarakat untuk menciptakan kebijakan, mempengaruhi keputusan, dan mengatur perilaku individu dan kelompok. Pentingnya melibatkan berbagai aspek, termasuk pemilihan umum, pembuatan kebijakan publik, diplomasi internasional, dan perdebatan tentang nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu komunitas atau negara.

2. Tujuan Demokrasi

Tujuan dari demokrasi adalah Pandangan demokrasi menurut beberapa pendapat :

- a. Demokrasi menyatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan demikian bahwa demokrasi bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari warga negara (rakyat) dalam proses politik dan pengambilan keputusan.²⁹
- b. Tujuan dari Demokrasi Menciptakan mekanisme yang memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, dan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.³⁰

²⁸Ibid

²⁹Berita Terkini, "Pengertian Demokrasi, Tujuan, dan Prinsipnya di Indonesia", 9 Februari 2024, (<https://www.kumparan.com/berita-terkini/pengertian-demokrasi-tujuan-dan-prinsipnya-di-indonesia-228DMe7mNXF>).

³⁰Mahfud, MD, "*Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*", Yogyakarta: PT. Gama Media, 13 April 2016, Hlm.72.

- c. Demokrasi bertujuan untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas yakni proses politik dan pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, dan para pemimpin politik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada rakyat..³¹
- d. Menurut Carol C. Gould, menyatakan tujuan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka.³²
- e. Dalam demokrasi Tujuan lainnya adalah kekuasaan penuh rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.³³

3. Pemilu

Sebagai sebuah acara demokratis yang penting, Pemilihan Umum menjadi titik fokus bagi masyarakat dan politisi di berbagai negara,

³¹Noer, Deliar, *"Perkembangan Demokrasi kita"*, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*", Jakarta; Jurnal LP3ES, 2018.No.1,Vol 2.

³²Carol C. Gould oleh Samuel P. Huntington, *"The Clash of Civilizations and Remaking of World Order"* Penerbit PT. Qalam, Yogyakarta 1996. Hlm.36.

³³Robert A. Dahl, *"Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol"*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1985.Hlm.58.

pemilu menandai periode di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakilnya di lembaga legislatif atau eksekutif, tergantung pada sistem politik masing-masing negara. Pemilihan umum di Indonesia diadakan secara berkala untuk memilih presiden, anggota parlemen, serta pemerintah daerah. Proses pemilihan tersebut diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan transparansi, keadilan, dan keabsahan hasil pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki peran penting dalam menjalankan proses demokrasi di negara Indonesia dengan mengatur dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari perencanaan, pendataan pemilih, penentuan calon, pelaksanaan pemungutan suara, hingga pengumuman hasil resmi. UU yang mengatur KPU adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang menetapkan berbagai ketentuan terkait pembentukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil.³⁴

Pemilu Serentak 2024 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pemilu paling spektakuler di dunia. Mengapa demikian? Hal tersebut

³⁴Komisi Pemilihan Umum, "*KPU dalam Proses Pemilu*" 1 Januari 2024 (<https://www.kpu.go.id/>).

disebabkan karena pemilu tersebut diadakan serentak pada hari yang sama untuk memilih lima jenis surat suara, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden atau biasa disebut dengan Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pemilu lima jenis surat suara telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024.³⁵

Pemilu memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Hal tersebut dapat mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan politik di antara semua warga negara.

Menurut Suryo Untoro, Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.³⁶ Disisi lain Eko Andika mengatakan pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.³⁷ Pemilu yang benar harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, di mana semua warga negara memiliki

³⁵Ridho Al-Hamdi, "CATATAN PARA SARJANA TENTANG DINAMIKA JELANG PEMILU SERENTAK 2024", *Jurnal Fisipol*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 17 Maret 2023, No 2, Vol 1.

³⁶Suryo Utoro dalam Website PelajarIndo.com, 26 February 2024, "Pengertian pemilu menurut para ahli" (<https://pelajarindo.com/pengertian-pemilu-menurut-para-ahli>).

³⁷Eko Andika dalam Suci Chaerunnisa Mutiara, "ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 TERHADAP NILAI-NILAI DEMOKRASI DI INDONESIA", Universitas Negeri Jakarta, 17 September 2019.

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memilih wakil-wakilnya. Definisi pemilu juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yakni “Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”³⁸ Kebenaran pemilu menjadi penting karena proses pemilu yang benar adalah pondasi bagi legitimasi pemerintahan yang demokratis, stabilitas politik, dan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan institusi demokratis.

C. Konsep Politik Identitas

1. Pengertian Politik

Secara umum, politik mencakup berbagai aktivitas dan institusi yang terlibat dalam pengaturan kehidupan bersama, termasuk proses pembuatan kebijakan, pemilihan umum, kampanye politik, diplomasi, dan aktivitas kelompok kepentingan. Politik adalah proses pembuatan keputusan yang terkait dengan pemerintahan suatu negara atau wilayah, serta cara-cara di mana kekuasaan didistribusikan dan dijalankan dalam masyarakat.

³⁸Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD diunduh dari (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37659>) pada tanggal 6 Juli 2019.

Menurut Hannah Arendt, Politik adalah tentang partisipasi aktif dalam urusan publik dan penciptaan ruang politik di mana warga negara bisa bertemu dan berdialog untuk mencapai serangkaian kegiatan tertentu.³⁹ Dengan kata lain, politik bukan hanya tentang proses pengambilan keputusan di pemerintahan, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat dalam membentuk kebijakan, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan adanya ruang politik yang terbuka, warga negara memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, mengajukan ide dan solusi, serta berkolaborasi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Tujuan utama politik adalah untuk mencapai keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan dalam suatu masyarakat. Politik juga dipandang sebagai hubungan manusia yang meliputi bentuk-bentuk kekuasaan, pengawasan, pengaruh, maka pengertian politik tidak lagi terbatas pada negara, tapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti: perkumpulan sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lain.⁴⁰ Politik dapat juga didefinisikan sebagai cara untuk memperoleh, mempertahankan,

³⁹Hannah Arendt dalam Mansyur Semma, *"Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia dan perilaku politik"*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, mei 2008. Hlm.109.

⁴⁰Bdulkadir B. Nambo & Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, *"MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah dari Sistem Politik)"*, jurnal Universitas Negeri Gorontalo, Volume XXI No. Gorontalo 2 April – Juni 2005.

atau menggunakan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2. Pengertian Politik Identitas

Identitas memberikan cara bagi individu atau kelompok untuk dikenali dan diterima oleh masyarakat tempat dimana tempat tinggalnya. Identitas dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan individu, termasuk perilaku, pandangan, hubungan interpersonal, dan partisipasi dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik, identitas merujuk pada sebuah tanda, jati diri, atau karakteristik yang membedakan suatu entitas dengan yang lain.⁴¹ Politik yang menggunakan sentimen entitas merujuk pada strategi politik yang mengandalkan penggunaan suatu identitas seperti agama, budaya, atau faktor-faktor identitas lainnya, untuk memobilisasi dukungan atau menggalang dukungan untuk tujuan politik tertentu, sentimen demikian adalah politik identitas.

Politik Identitas adalah strategi dan taktik untuk memotivasi individu atau kelompok untuk terlibat dalam proses politik atau mendukung tujuan politik tertentu, ini memungkinkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam proses politik. Menurut Hannah Arendt, Pengertian politik identitas adalah Sebuah cara pandang politik

⁴¹Amalia Putra, Riyantib, dkk, "MENGENAL IDENTITAS NASIONAL INDONESIA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA DI ERA 4.0", *Jurnal Fakultas Ekonomi*, Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, mei 2023 vol 3. NO.5.

untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam mencari dukungan dan pengakuan.⁴² Politik identitas suatu individu atau kelompok yang kuat seringkali lebih cenderung untuk terlibat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, kampanye politik, atau demonstrasi. Politik Identitas juga dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan.

Menurut Laode machdani afanla, Dalam dunia politik pesan politik melalui kampanye sering kali dirancang untuk merespons politik identitas pemilih dan mempengaruhi cara pemilih memahami isu-isu politik, pesan tersebut sering dirancang untuk merangsang emosi pemilih dan mengaitkan identitas dengan nilai-nilai dan tujuan tertentu.⁴³ Kelompok politik dapat mencoba untuk menyatukan berbagai kelompok yang memiliki identitas yang serupa atau memiliki kepentingan yang sama untuk mendukung tujuan politik bersama. Konsep kebenaran politik identitas merujuk pada keyakinan bahwa pandangan atau perspektif politik yang didasarkan pada identitas kelompok tertentu, seperti kekuasaan, pemerintahan, mempengaruhi, keadilan adalah bentuk kebenaran yang harus diakui dan diperjuangkan dalam arena politik.

⁴²Hannah Arendt dalam Ubed Abdilah, "*Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*", Yayasan Indonesiatera Anggota IKAPI, Magelang, Februari 2002, Hlm. 16.

⁴³Laode machdani afanla, "*Politik Identitas di Indonesia*", UB Pres Book, Malang, April 2020, Hlm.8.

Bagi yang mendukung konsep kebenaran politik identitas, identitas bukan hanya tentang karakteristik pribadi, tetapi juga tentang pengalaman kolektif yang mampu menjadi ajang permainan dalam politik untuk menaikkan kandidat politik mereka. kebijakan dan tindakan politik harus memperhitungkan perspektif dan kepentingan kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan atau didiskriminasi dalam masyarakat. Kebenaran politik identitas juga hendaknyalah sesuai dengan sila kelima pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁴ Dalam menjalankan politik identitas harus bersikap adil.

3. Politik identitas Kotor

Istilah "politik identitas kotor" mengacu pada praktik politik yang memanipulasi atau mengeksploitasi identitas individu atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan politik, seringkali dengan cara yang tidak etis atau merugikan. Hal tersebut bisa termasuk menggunakan retorika yang memprovokasi atau memicu perpecahan antara kelompok-kelompok berbeda, menyebarkan propaganda atau stereotip negatif tentang kelompok tertentu, atau memanfaatkan ketakutan dan prasangka untuk menggerakkan massa.

Politik identitas seringkali dipandang sebagai sesuatu hal yang kotor sering kali dimotivasi oleh kepentingan politik atau kekuasaan,

⁴⁴Sila kelima pancasila.

dengan tujuan untuk memperkuat posisi politik atau memenangkan dukungan publik dengan cara-cara yang tidak jujur atau tidak bermoral, Praktik politik identitas kotor sering kali dianggap sebagai bentuk manipulasi yang tidak bermoral dan dapat merusak integritas demokrasi. Dampak buruk dari politik identitas yang kotor adalah terjadinya praktik nepotisme dan kolusi dimana menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Mereka memberikan keunggulan yang tidak adil kepada orang-orang yang memiliki hubungan personal atau hubungan darah dengan para kandidat politik, sementara orang lain yang lebih berkualifikasi atau berpotensi terpinggirkan.

Menurut Heller, Politik Identitas dapat memicu terjadinya Nepotisme dan kolusi dimana serangkaian politik praktis dilakukan untuk mencapai tujuan pribadi.⁴⁵

Dalam konteks politik identitas, melihat peran tongkonan di Lembang Rante Uma, menyikapi kelompok atau individu dalam tongkonan tertentu mungkin memanfaatkan identitas suatu tongkonan untuk memperoleh kekuasaan atau sumber daya politik, hal tersebut dapat menciptakan lingkungan di mana kolusi dan nepotisme lebih mungkin terjadi dalam suatu tongkonan. Misalnya, pemimpin politik dari suatu identitas tertentu mungkin lebih cenderung untuk

⁴⁵Heller, "*Politik Identitas Biasanya Digunakan Oleh Para Pemimpin*". Jurnal Haboddin USA, diterjemahkan oleh JIAKP, Semarang, 24 Oktober 2018, Vol 2 Nomor 2.

memberikan kontrak atau posisi kepada anggota keluarganya, bisa saja tongkonan di jadikan bahan politik untuk menjatuhkan calon-calon politik yang lain, ataukah bahkan jika pribadi yang kurang kompeten atau tidak memenuhi syarat secara objektif untuk menjadi anggota politik tetapi dengan rayuan identitas tongkonan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat terpilih.

4. Politik identitas baik

Istilah politik identitas yang baik bisa diinterpretasikan dalam beberapa cara, tergantung pada konteksnya. Politik tidak selamanya harus di perspektifkan sebagai sesuatu hal yang kotor tetapi juga harus dilihat dan merujuk pada pandangan bahwa politik identitas dapat memiliki efek positif atau mengarah pada perubahan yang baik dalam masyarakat.

Pengakuan dan Representasi Penting bagi politik identitas yang baik untuk memberikan pengakuan yang adil dan representasi yang memadai bagi semua kelompok identitas dalam kehidupan politik dan masyarakat.⁴⁶ Dampak dari politik identitas yang dilakukan dengan baik adalah dapat menjadi alat untuk melawan diskriminasi dan ketidaksetaraan yang sistematis. Hal tersebut dapat mendorong adopsi kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan dari hal

⁴⁶Haryaeni, Amelia, & Yulita Pujilestari, " *Sistem Politik Indonesia*", Jurnal fakultas Hukum Universitas Indonesia (JFHUI), Jakarta, 06 April 2017, No 2, Vol 3.

nepotisme dan kolusi. Menurut Yudi Latief, Politik identitas baik ada 3 bentuk yakni ada yang *good*, ada yang *bad*, dan *ugly*.⁴⁷

Politik identitas bisa menjadi *good* (beradab) atau mempunyai peran positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain.

Politik identitas *ugly* merujuk pada situasi di mana politik identitas digunakan dengan cara menghindari hal yang negatif atau merugikan. Hal tersebut bisa termasuk penggunaan politik identitas dimana ketika melakukan kampanye politik dengan sehat dari diskriminasi, menghindari prasangka, atau mencegah hal yang dapat memecah belah masyarakat.

Politik identitas *bad* dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak politik untuk memperoleh dukungan politik atau mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih penting dengan catatan benar-benar memperhatikan hal yang penting di masyarakat dan tidak mencoba menjatuhkan lawan politik.

⁴⁷M.Iqbal Ahnaf dalam Artikel Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, "*politik identitas tak terhindarkan*", 19 Maret 2022, (<https://www.politikidentitas-takterhindarkan>).